

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai Politik pertama-tama lahir di Eropa barat. Dengan perluasannya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta perlu di ikut sertakan dalam proses politik. Maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.

Pada awal perkembangannya, akhir dekade 18-an di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok Politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat *elitis* dan *aristokratis*, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan Raja. Semakin meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum (kadang-kadang dinamakan *caucuss party*). Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik di parlemen lambat laun juga berusaha mengembangkan organisasi massa. Maka pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik, yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung (*link*) antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.¹

Kemunculan partai pertama kali dengan memahami kronologis sejarah munculnya ide pembentukan partai politik yang bermula pada abad ke-18. Latar

¹ Asshiddiqie, "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi. Jurnal artikel *Konstitusi* volume. 3 no. 4 tahun (2006)", hlm. 13.

belakang terbentuknya sebuah partai *intra-parlemen* pada masa ini di karenakan kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan tiap-tiap daerah. Pada tahun 1789 di *Versailles*, perwakilan-perwakilan provinsi pada *general state* mengadakan pertemuan. Sekelompok anggota legislatif dari daerah yang sama tersebut berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan daerah mereka masing-masing. Kegiatan ini pertama kali dilakukan oleh para wakil dari *Breton*. Mereka secara reguler melakukan pertemuan dengan menyewa sebuah Kafe. Di sana mereka berbagi pendapat terkait masalah-masalah daerah mereka dan terbentuklah apa yang mereka sebut dengan "*Breton Club*". Dalam perkembangannya anggota Klub ini tidak hanya beranggotakan para wakil rakyat dari *Breton* saja. Mereka juga membuka kesempatan kepada para wakil daerah lain untuk bertukar pendapat sehingga topik pembahasan mereka sampai kepada isu-isu nasional. Dengan perkembangan inilah mereka menjelma menjadi kelompok ideologis. Selain "*Breton Club*", perkembangan awal seperti ini juga di alami oleh "*Girondin Club*".²

Partai politik merupakan salah satu dari bentuk pelembagaan sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis.³ Secara definitif partai politik itu sendiri adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia

²*Ibid.*, hlm. 19.

³Raymond Boundon, *Theories Of Social Change : A Critical Appraisal*. (Diterjemahkan oleh J.C. Whitehouse, cal University of California Press, 1986). hlm. 121-153.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana: (i) Komunikasi politik, (ii) Sosialisasi politik (*Political socialization*), (iii) Rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (iv) pengatur konflik (*Conflict management*). Di sini jelas memang terlihat bagaimana arti penting sebuah partai politik dalam sebuah sistem demokrasi.

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interests articulation*) atau *political interests* yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi, dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu di advokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.

Di Indonesia, kemunculan partai-partai politik tak terlepas dari terciptanya iklim kebebasan yang luas bagi masyarakat pasca runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda. Kebebasan tersebut memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk partai politik.⁴Sebenarnya, cikal-bakal dari munculnya partai politik sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. partai politik yang lahir selama masa penjajahan tidak terlepas dari peranan gerakan-gerakan yang tidak hanya di maksudkan untuk mendapatkan

⁴Asshiddiqie, *Op.cit*, hlm. 15-16.

kebebasan yang lebih luas dari penjajah, juga menuntut adanya kemerdekaan.⁵ Hal ini bisa di lihat dengan lahirnya partai-partai sebelum kemerdekaan.

Partai politik dan demokrasi untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai wujud bekerjanya demokrasi diperlukan adanya partai politik. Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin dilakukan jika ada pengorganisasi berdasarkan tujuan-tujuan kenegaraan. Tugas partai politik adalah untuk menata aspirasi rakyat untuk di jadikan “*public opinion*” yang lebih sistematis sehingga dapat menjadi dasar pembuatan keputusan yang teratur.⁶

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih dari pada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan ‘*nafsu birahi*’ kekuasaannya sendiri. Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu “*at the expense of the general will*” atau kepentingan umum.⁷

Dalam hal ini pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus sesuai dengan janji dan visi misinya. Sebab otonomi daerah yang di jalankan

⁵Dr Mohaddam Labolo, teguh Ilham, *Partai Politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia.*(Jakarta: PT.Grafindo persada 2015), hlm. 2.

⁶WIDIARTO, “*Hubungan Rakyat (Pemilih) dengan Wakil Rakyat dan Partai Politik.*” (Jurnal Konstitusi volume. 2 no. 4 tahun 2006), hlm. 7.

⁷Sirajuddin, “*Eksistensi Partai Politik Dalam Sistem Hukum Ketata negaraan Di Indonesia.*” Jurnal artikel Lex Administratum volume. IV no. 1 tahun (2016), hlm. 77.

atau di pimpin oleh pemimpin daerah tidak lepas dari partai politik yang mengusungnya. Partai politik mempunyai peran dalam membina kadernya yang di pemerintah sebagai jembatan penghubung dalam menyampaikan aspirasi dan masukan untuk membantu kinerja pemerintahan dalam mewujudkan otonomi daerah di wilayah partai politik tersebut berada.

Berkaitan dengan otonomi daerah ini, bagi pemerintah dimana keberadaannya berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai ujung tombak pembangunan. Daerah semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal merumuskan kebijakan daerah (Dalam bentuk peraturan daerah), merencanakan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dapat memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat.

Melihat dari pernyataan diatas betapa pentingnya peran partai politik ikut serta dalam memajukan dan memberikan kontribusi terhadap bangsa, negara dengan menyalurkan infirasinya terhadap wilayah di mana partai politik tersebut berada, terutama dalam daerah otonom. Tentu di harapkan dalam penelitian ini mendapatkan apa yang dapat di sumbangkan atau apa yang dapat di bantu oleh partai politik terhadap otonomi daerah. Keberadaan partai politik sangatlah nyata terutama di wilayah Kalimantan selatan, khususnya wilayah Kota Banjarmasin, namun tentu banyak masyarakat yang belum memahami apa pentingnya partai politik untuk pembangunan suatu wilayah secara khusus.

Dari semua uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian dengan judul, **"Kontribusi Partai Politik Dalam Otonomi Daerah Di Kota Banjarmasin"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi partai politik dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana kendala-kendala partai politik dalam melakukan kontribusi pada pelaksanaan otonomi daerah di Kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi partai politik dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala partai Politik dalam melakukan kontribusi pada pelaksanaan otonomi daerah di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan baik bagi penulis maupun bagi pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Sebagai bahan telaah, informasi serta sumbangan pemikiran khususnya dibidang Hukumtata Negara bagi siapa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut seputar masalah yang berkaitan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah *khazanah* dalam perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah.

E. Definisi dan Oprasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan pengertian dalam memberikan interpretasi judul di atas, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Kontribusi adalah uang iuran (kepada perkumpulan), sumbangan.⁸

Sedangkan yang dimaksudkan adalah sumbangan, yaitu sumbangan partai Politik dalam penyelenggaraan otonomi daerah di daerah otonom tersebut.

2. Partai politik adalah terdiri dari 2 (dua) kata yaitu partai dan politik. Partai sendiri bersal dari bahasa latin yaitu *partie* yang bermakna membagi. Sedangkan politik berasal dari bahasa Inggris yaitu *politics* yang artinya bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut peroses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. Sehingga partai politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis ideologi yang jelas, dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan yang sama dan bertujuan untuk merebut⁹ kekuasaan atau mempengaruhi kebijakan negara baik secara langsung maupun tidak langsung serta ikut pada sebuah mekanisme pemilihan umum untuk bersaing secara kompetitif guna mendapatkan dukungan rakyat.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2011 tentang partai politik berbunyi:

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga,(Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 592.

⁹Negara, “Pembentukan Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.” jurnal artikel volume. 1 no. 2 tahun (2012), hlm. 14.

“ Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”

3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Yang tercantum dalam (Undang-Undang Republik Indonesia no 23 tahun 2014 tentang otonomi Daerah bab 1 pasal satu poin ke-6).

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang akan diteliti. Oleh sebab itu penulis membuat tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang dimaksud yaitu penelitian yang dilakukan oleh :

1. Ari Setiawan 100130093 Mahasiswa IAIN Antasari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul *“Peran Kader Golongan Karya (GOLKAR) Dalam Pembinaan Kehidupan Beragama Di Kalimantan Selatan”*. Dalam penelitiannya tersebut mengangkat suatu permasalahan yang berkaitan dengan peran partai politik di Kalimantan Selatan, yang membedakan penelitian ini adalah Iwan Setiawan mengangkat tentang satu partai yang di

¹⁰Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo persada, 2005), hlm. 3.

teliti dalam Kontribusi partai politik dalam pembinaan, sedangkan penulis mengangkat beberapa partai dalam kontribusi terhadap otonomi daerah di Kota Banjarmasin.¹¹

2. Al Mubarak Muhammad Adi Riswan Mahasiswa IAIN Antasari dengan judul *“Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pemenangan Kepala Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008.”* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dalam penelitiannya tersebut mengangkat suatu permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana cara suatu partai politik dalam memenangkan kepala daerah yang telah di usung oleh partai Politik Keadilan Sejahtera, perbedaan dengan skripsi Al Mubarak Muhammad Adi Riswan adalah ia mengangkat satu partai dalam kontribusi dalam kemenangan kepala daerah di kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan penulis mengangkat tentang beberapa partai politik dalam kontribusinya dalam otonomi daerah di Kota Banjarmasin.¹²

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab yang sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah dan secara umum merujuk kepada panduan penulisan yang diatur oleh Fakultas Syariah, yaitu dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

¹¹Ari Setiawan, *“Peran Kader Golongan Karya (GOLKAR) Dalam Pembinaan Kehidupan Beragama Di Kalimantan Selatan”*, Skripsi tidak di terbitkan; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2013, hlm. 10.

¹²<http://idr.uin-antasari.ac.id/cgi/latesttool?output=RSS2>. (9 September 2018, jam 11:23 Wita).

Bab II Landasan Teori, pada bab ini akan dijelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan membahas hubungan antara hal yang bersifat teoritis dan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis, merupakan hasil penelitian yang berisi analisis terhadap beberapa permasalahan yang dibahas pada bab III.

Bab V Penutup, pada bab ini penulis membuat simpulan atas hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.¹³

¹³M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), cetakan VI, hlm. 63.